



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

- Nama** : FERMI TRAFIANTO
- Jabatan** : VICE PRESIDENT PENGENDALIAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN GARDU
INDUK SUMATERA, JAWA, MADURA DAN BALI
- NHK** : 205613

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.275.425.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/57 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 690.425.000
- Tanah Seluas 101 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
- Tanah Seluas 101 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 395.000.000

- MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 151.500.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 625.367.318

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.447.292.318
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.447.292.318

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.